Bupati Lebak Ingin Pembangunan KIT tak Rusak Lingkungan

Selama ini, menurut Bupati Iti Octavia Jayabaya, Lebak masuk kategori daerah rawan bencana banjir, longsor, gempa, kebakaran hutan, dan lainnya. Karena itu ia berharap para investor yang datang ramah lingkungan, di antaranya membuka industri manufaktur maupun pengelolaan hasil perkebunan, pertanian, dan peternakan.

LEBAK (IM) - Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya mengatakan ingin investor yang kelak menanamkan modal di Kawasan Industri Terpadu (KIT) di Kecamatan Cileles adalah perusahaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

"Kita berharap pengembangan KIT nanti industri yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan kerusakan alam," kata Iti Octavia di Lebak, Sabtu.

Pemerintah daerah (pemda), kata dia,akan mengutamakan pengembangan KIT seluas 3.000 hektare yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, sebab wilayah ujung barat Provinsi Banten itu merupakan daerah pertanian, perkebunan, dan reboisasi penghijauan.

"Pengembangan KIT harus bersinergi dengan lingkungan agar tidak menimbulkan kerusakan alam yang bisa mengakibatkan bencana," katanya.

Selama ini, lanjutnya, Lebak masuk kategori daerah rawan bencana banjir, longsor, gempa, kebakaran hutan, dan lainnya.

Karena itu ia berharap para investor yang datang ramah lingkungan, di antaranya membuka industri manufaktur maupun pengelolaan hasil perkebunan, pertanian, dan peternakan.

Apalagi, kata dia, Kecamatan Cileles sebagai daerah perkebunan kelapa sawit terbesar di Provinsi Banten.

"Kami ingin investor itu yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga memberikan kesejahteraan kepada masyarakat setempat, " katanya.

Menurut dia, pengembangan KIT di Kabupaten Lebak akan terealisasi antara 3-5 tahun ke depan dan didukung sarana transportasi pembangunan jalan tol Serang - Panimbang yang terkoneksi dengan kawasan industri di Jakarta, Tangerang, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek).

Kemungkinan besar investor dari Jabotabek akan melirik pengembangan usaha di ujung barat Provinsi Banten, apalagi Kabupaten Lebak memiliki keunggulan karena berdekatan dengan Bandara Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Ciwandan, dan Induk gardu listrik di Suralaya Merak, Cilegon, dan Labuan.

Selain itu ada pasokan air bersih cukup dari Waduk Karian dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidurian dan Ciliman.

Pemerintah setempat kini mempersiapkan pengembangan KIT melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan masterplannya.

"Kami optimistis pengembangan KIT nanti meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga menyerap ribuan tenaga kerja lokal, " katanya.

Bupati juga mengatakan nantinya para investor yang membangun pabrik harus mengutamakan pengadaan material bangunan dari pengusaha lokal guna membantu perekonomian warga.

Saat ini, kata dia, banyak pengusaha lokal menggeluti bidang usaha pengadaan material bangunan.

"Jika memanfaatkan material bangunan dari pengusaha lokal dipastikan akan menggulirkan pendapatan ekonomi warga setempat, " katanya. ● **pra**

TOTAL BERJUMLAH 1.180.824 PEMILIH

KPU Kota Tangerang Lakukan Rekapitulasi Pemutakhiran DPB

TANGERANG (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Periode Mei 2021. Rekapitulasi DPB periode Mei ini merupakan hasil dari pemutakhiran secara berkelanjutan.

Selain itu, kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Serta Surat KPU Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2021.

"Berdasarkan Berita Acara KPU Kota Tangerang Nomor 8/PL.02.1-BA/3671/KPU-Kota /IV.2021 tanggal 02 Juni tahun 2021 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Mei berjumlah 1.180.824 pemilih yang tersebar di 13 kecamatan dengan jumhlah laki-laki 588.779 dan perempuan 592.045," jelas Ahmad Syailendra, Ketua KPU Kota Tangerang, Minggu (6/6).

Jumlah DPB Periode Mei tersebut mengalami penurunan sebanyak 696 pemilih jika dibandingkan dengan jumlah DPB Periode April berjumlah 1.181.520 dengan jumlah laki-laki 589.187 dan perempuan 592.333.

"Dalam rangka memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan/tanggapan terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan, KPU Kota Tangerang membuka layanan melalui portal website https://kota-tangerang.kpu.gp.id dan Whatsapp https://tinyurl.com/WAdataDPB yang dapat diakses selama 24 jam," jelas Syailendra.

Bagi para pemilih yang ingin mendaftakan dirinya, seperti pemilih baru dan atau ingin mengetahui informasi seputar DPB dapat mengakses link berikut :

Form Pendaftaran DPB : https://tinyurl.com/dpb-kpukotang, Kontak whatsapp untuk informasi seputar DPB : https://tinyurl.com/WAdataDPB. ● **pp**

Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2019

Piutang pembiayaan konsumen Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp 3.454.379 juta atau turun sebesar Rp 948.078 juta atau minus 21,54% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp 4.402.457 juta. Penurunan piutang pembiayaan konsumen ini disebabkan karena menurunnya jumlah pembiayaan baru sebesar 41,28% pada tahun 2020 yang disebabkan karena kebijakan Perseroan untuk melakukan pembiayaan baru yang menyesuaikan dengan kondisi Pandemi Covid-19.

Piutang Lain-lain

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2019

Piutang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp 22.192 juta atau naik sebesar Rp 1.447 juta atau 6,98% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp 20.745 juta. Peningkatan piutang lain-lain ini disebabkan oleh peningkatan penerimaan angsuran konsumen yang dibayarkan melalui *payment point* yang belum dilakukan *settlement* oleh pihak *payment point*.

Aset tetap

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2019

Aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp 177.857 juta atau naik sebesar Rp 10.017 juta atau 5,97% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp 167.840 juta. Kenaikan aset tetap ini disebabkan karena adanya perubahan PSAK 73 atas aset hak guna bangunan.

Aset Tak berwujud

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2019

Aset tak berwujud Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp 3.968 juta atau naik sebesar Rp 1.699 juta atau 74,88% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp 2.269 juta. Kenaikan aset tak berwujud ini disebabkan karena adanya penambahan aset tidak berwujud selama tahun 2020.

Aset Pajak Tangguhan

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2019

Aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp 37.750 juta atau naik sebesar Rp 12.064 juta atau 46,97% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp 25.686 juta. Kenaikan aset pajak tangguhan ini disebabkan sebagian besar karena peningkatan koreksi fiskal atas penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan konsumen.

Liabilitas

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp 1.875.421 juta atau turun sebesar Rp 572.838 juta atau minus 23,40% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp 2.448.259 juta. Penurunan liabilitas ini sebagian besar disebabkan oleh menurunnya jumlah pinjaman dari perbankan yang disesuaikan dengan kebutuhan pinjaman yang mengikuti penurunan pembiayaan baru sebesar 41,28% di tahun 2020.

Utang Usaha

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2019

Utang usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp 65.342 juta atau turun sebesar Rp 30.181 juta atau minus 31,60% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp 95.523 juta. Penurunan utang usaha ini disebabkan karena adanya penurunan pembiayaan baru atas konsumen diakhir tahun 2020 yang belum terbayarkan ke *dealer*.

Akrual

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2019

Akrual Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp 38.274 juta atau turun sebesar Rp11.896 juta atau minus 23,71% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp 50.170 juta. Penurunan akrual ini disebabkan karena adanya penurunan akrual atas beban bunga dan beban karyawan.

Utang Pajak

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2019

Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp 31.226 juta atau turun sebesar Rp 18.649 juta atau minus 37,39% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp 49.875 juta. Penurunan utang pajak ini terutama disebabkan adanya penurunan kewajiban Perseroan terhadap PPh Pasal 29 sebagai akibat terjadinya penurunan laba selama periode berjalan.

Utang Lain-lain

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2019

Utang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp 38.008 juta atau naik sebesar Rp 23.559 juta atau 163,05% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp 14.449 juta. Kenaikan utang lain-lain ini terutama sebagian besar disebabkan karena adanya kenaikan jumlah titipan konsumen selama tahun 2020.

Pinjaman

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2019

Pinjaman Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp 787.278 juta atau turun sebesar Rp 591.913 juta atau minus 42,92% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp 1.379.191 juta. Penurunan pinjaman ini disebabkan karena seiring penurunan jumlah pembiayaan selama tahun 2020.

Utang Obligasi - Bersih

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2019

Utang obligasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp 837.565 juta atau naik sebesar Rp 64.870 juta atau 8,40% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp 772.695 juta. Kenaikan utang obligasi ini disebabkan karena adanya penerbitan Obligasi Berkelanjutan III tahap IV Tahun 2020, Obligasi Berkelanjutan III tahap V Tahun 2020.

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas imbalan pasca kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp 77.728 juta atau turun sebesar Rp 8.628 juta atau minus 9,99% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp 86.356 juta. Penurunan ini disebabkan karena adanya realisasi beban karyawan yang menurun sesuai dengan penurunan jumlah karyawan.

Ekuitas

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2019

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp 2.334.972 juta atau naik sebesar Rp 57.077 juta atau 2,51% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp 2.277.895 juta. Kenaikan ekuitas ini disebabkan karena adanya penambahan perolehan laba bersih Perseroan selama periode berjalan.

Rasio Keuangan

Rasio Likuiditas

Cash ratio Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 33,32% dan 3,17%. Peningkatan *cash ratio* tersebut disebabkan karena pada tahun 2020 kas dan setara kas meningkat sebesar Rp 422.323 juta sedangkan libilitas lancar menurun sebesar Rp 302.942 juta.

Current ratio Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 285,36% dan 249,95%. Penurunan *current ratio* tersebut disebabkan karena pada tahun 2020 liabilitas lancar menurun sebesar 16,68% atau sebesar Rp 302.942 juta, sedangkan peningkatan aset lancar pada tahun 2020 hanya sekitar 0,67% atau sebesar Rp 20.024 juta.

Rasio Solvabilitas

Rasio liabilitas terhadap ekuitas adalah tingkat perbandingan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas. Rasio liabilitas terhadap ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 80,32% dan 107,48%. Penurunan rasio liabilitas terhadap ekuitas disebabkan karena adanya penurunan pada utang bank sebesar Rp 591.913 juta.

Rasio liabilitas terhadap aset adalah perbandingan antara seluruh liabilitas dengan jumlah aset. Rasio liabilitas terhadap aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 44,54% dan 51,80%. Penurunan rasio liabilitas terhadap aset disebabkan karena adanya penurunan pada utang bank sebesar Rp 591.913 juta.

Gearing ratio adalah ratio jumlah kewajiban yang mengandung beban bunga (pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan) dibandingkan dengan jumlah ekuitas Perseroan. *Gearing ratio* untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 0,70x dan 0,94x. Penurunan *gearing ratio* tersebut disebabkan karena adanya penurunan pada utang bank sebesar Rp 591.913 juta**.**

Rasio Profitabilitas

Tingkat pengembalian aset (*Return On Asset*) menunjukan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan dari aset yang dimiliki Perseroan. Tingkat pengembalian aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 4,14% dan 7,98%. Penurunan ROA Perseroan disebabkan karena adanya penurunan laba bersih pada tahun 2020 sebesar Rp 202.687 juta dan penurunan jumlah aset di tahun 2020 sebesar Rp 515.761 juta dibandingkan tahun 2019.

Tingkat pengembalian ekuitas (*Return On Equity*) menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan dari ekuitas yang ditanamkan. Tingkat pengembalian ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 7,47% dan 16,55%. Penurunan ROE Perseroan disebabkan karena penurunan laba bersih pada tahun 2020 sebesar Rp 202.687 juta dan peningkatan jumlah ekuitas di tahun 2020 sebesar Rp 57.077 juta dibandingkan tahum 2019.

Data Laporan Arus Kas

Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Operasi

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Nilai aliran arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 1.052.458 juta meningkat sebesar Rp 1.692.971 juta atau 264,31% dibandingkan pada 31 Desember 2019 yang sebesar minus Rp 640.513 juta. Peningkatan arus kas dari aktivitas operasi ini terutama disebabkan oleh penurunan atas pelepasan pembiayaan baru di tahun 2020 sebesar 41,28% dan efisiensi beban gaji dan kesejahteraan karyawan mengikuti penurunan jumlah karyawan.

Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Nilai aliran arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar minus Rp 19.570 juta meningkat sebesar Rp 12.027 juta atau 38,06% dibandingkan pada 31 Desember 2019 yang sebesar minus Rp 31.597 juta yang diperoleh dari aktivitas investasi. Peningkatan arus kas dari aktivitas investasi ini terutama disebabkan oleh penuruan pembelian aset yang disesuaikan dengan kebutuhan aset Perseroan.

Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Nilai aliran arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar minus Rp 608.572 juta menurun sebesar Rp 1.272.833 juta atau minus 191,62% dibandingkan pada 31 Desember 2019 yang sebesar Rp 664.261 juta. Penurunan arus kas dari aktivitas pendanaan ini terutama disebabkan oleh penurunan perolehan pinjaman baru dari kreditur yang disesuaikan dengan penurunan kebutuhan untuk pembiayaan baru akibat Covid-19.

Likuiditas dan Sumber Modal

Sumber pendanaan Perseroan pada tahun 2020 berasal dari pinjaman bank dan utang obligasi sebesar Rp 787.278 juta dan Rp 837.565 juta, sisanya berasal dari modal Perseroan.

Sumber pendanaan dari pinjaman bank yang belum digunakan adalah sebesar Rp 412.131 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Pada saat prospektus diterbitkan, tidak dapat permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Operasional Per Segmen Operasi

Perseroan menyediakan pembiayaan kendaraan bermotor kepada konsumen dengan basis konvensional dan syariah. Penyediaan pembiayaan konsumen harus sesuai dengan sumber daya keuangan yang diperoleh melalui pinjaman yang bersifat konvensional dan syariah. Rincian pendapatan menurut segmen operasi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Konvensional	1.150.978	1.274.843
Syariah	410.237	470.876
Jumlah pendapatan	1.561.215	1.745.719
Jumlah Beban	1.327.729	1.231.859
Laba Sebelum Pajak	233.486	513.860

Belanja Modal

Selama tahun 2019 dan 2020, Perseroan melakukan belanja barang modal (*capital expenditure*) dengan jumlah keseluruhan masing-masing mencapai Rp 36.133 juta dan Rp 22.720 juta. Tujuan dari pengeluaran barang modal tersebut adalah untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan. Sumber dana yang digunakan untuk belanja barang modal terutama berasal dari dana internal Perseroan. Seluruh transaksi pembelian barang modal dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga dalam hal ini tidak diperlukan adanya transaksi lindung nilai.

Keterangan secara lengkap mengenai Analisis Pembahasan Manajemen dapat di lihat pada Bab V Prospektus.

FAKTOR RISIKO

Para calon investor Sukuk Mudharabah sebaiknya mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan di dalam Prospektus dan faktor risiko yang disajikan berikut ini.

A. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN PERSEROAN

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, bidang usaha yang dilakukan Perseroan juga tidak terlepas dari risiko yang disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi secara negatif kegiatan usaha Perseroan. Di bawah ini adalah risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan yang perlu dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada Perseroan. Risiko-risiko berikut telah diurutkan berdasarkan risiko yang memiliki bobot tertinggi sampai terendah, yaitu:

1. Risiko Pembiayaan;
2. Risiko Pendanaan;
3. Risiko Persaingan;
4. Risiko Operasional;
5. Risiko Kebijakan Moneter;
6. Risiko Kepatuhan;
7. Risiko Perubahan Teknologi;
8. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi;
9. Risiko Kelangkaan Sumber Daya.

B. RISIKO UMUM YANG BERKAITAN DENGAN PERSEROAN

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro dan Global;
2. Risiko Perubahan Valuta Asing;
3. Risiko Sosial dan Keamanan;
4. Risiko Ketentuan Negara Lain;
5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum.

C. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN SUKUK MUDHARABAH

Risiko yang dihadapi investor pembeli Sukuk Mudharabah adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Sukuk Mudharabah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Sukuk Mudharabah sebagai investasi jangka panjang;
2. Risiko Gagal Bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada tanggal yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Sukuk Mudharabah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan;
3. Sebagai instrumen investasi, nilai Sukuk Mudharabah dapat berfluktuasi sesuai dengan kondisi pasar.

Keterangan secara lengkap mengenai Risiko Usaha dapat dilihat pada Bab VI Prospektus.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 30 April 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Vidya Cipta Leasing Corporation berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.147 tanggal 13 Agustus 1983 juncto Akta Perubahan No.261 tanggal 23 September 1983 juncto Akta Perubahan No.105 tanggal 11 Oktober 1983, yang seluruhnya dibuat dihadapan Joenoes Enoeng Maogimon, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No.C2-6783.HT.01.01.TH.83 tanggal 15 Oktober 1983 dan telah didaftarkan pada buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No.4072/1983, No.4073/1983 dan No.4074/1983 tertanggal 21 Oktober 1983 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.63 tanggal 8 Agustus 1989, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.1526/1989. Sejak pendirian, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dimana perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan adalah didasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.70 tanggal 18 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No.AHU-0042577.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 26 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No.AHU-0121361.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 26 Juli 2019 ("Akta PKR No.70/2019") yang mengubah Pasal 3 anggaran dasar mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Lampiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No.19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No.95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2017) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.05/2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

2. Struktur Permodalan Perseroan

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan pada tanggal 30 April 2021, susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan di atas 5% (lima persen) adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
PT Jayamandiri Gemasejati	1.866.000.000	93.300.000.000	70,42
Alex Hendrawan (komisaris Utama)	134.000.000	6.700.000.000	5,05
Masyarakat*	650.000.000	32.500.000.000	24,53
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	**2.650.000.000**	**132.500.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**5.350.000.000**	**267.500.000.000**	

*) *kepemilikan masing-masing saham di bawah 5%*

3. Keterangan Mengenai Aset Tetap

Perseroan memiliki dengan sah atas tanah-tanah yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan status Hak Guna Bangunan yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) bidang tanah dan pekarangan serta bangunan yang berada diatasnya. Berdasarkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor, Perseroan memiliki dan menguasai secara sah sebanyak 120 (seratus dua puluh) unit kendaraan bermotor roda empat dan 183 (seratus delapan puluh tiga) unit kendaraan bermotor roda dua.

4. Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.01 Tanggal 2 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No.AHU-AH.01.03.0346867 tanggal 3 Juni 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No.AHU-0097438.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 3 Juni 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Prospektus adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Alex Hendrawan
Komisaris : Randy Guan

Direksi

Direktur Utama : Harryjanto Lasmana *)
Direktur : Felix Ciptadi Nugroho
Direktur : Christel Lasmana

*) *Pengangkatan Harryjanto Lasmana sebagai Direktur Utama akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

5. Sumber Daya Manusia

Jumlah karyawan pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sejumlah 4.415 orang. Dari jumlah tersebut seluruhnya adalah karyawan tetap. Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

6. Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Sampai dengan Prospektus diterbitkan, Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara apapun baik perkara perdata, pidana, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, dan perpajakan serta tidak terdaftar sebagai termohon dalam perkara kepailitan atau telah dinyatakan dalam kedaan pailit dengan pihak lain di badan-badan peradilan.

Disamping itu, Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak terlibat dalam suatu sengketa hukum/perselisihan yang terjadi di luar pengadilan dan/atau mendapatkan teguran (somasi) dari pihak ketiga yang dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kegiatan usaha Perseroan.

7. Kegiatan Usaha

Perseroan telah memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dari Menteri Keuangan berdasarkan Surat Keputusan No.323/KMK.017/1997 tanggal 21 Juli 1997, yang merupakan perubahan dari Keputusan Menteri Keuangan No.KEP-002/KM.11/1984 tanggal 6 Januari 1984 tentang Pemberian Izin Usaha Leasing Kepada PT Mandala Multifinance (dahulu PT Vidya Cipta Leasing Corporation) yang telah diperpanjang terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No.KEP-133/KM.13/1988 tanggal 18 Juli 1988.

Perseroan telah memiliki izin pembukaan unit usaha syariah berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-125/NB.223/2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang Pemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Kepada PT Mandala Multifinance Tbk.

Sumber pendapatan Perseroan yang memberikan kontribusi terbesar yakni sebesar 97,07% berasal dari pendapatan pembiayaan konsumen.

a. Pembiayaan Sepeda Motor

Saat ini Perseroan mengkhususkan dirinya dalam kegiatan pembiayaan konsumen, khususnya pembiayaan sepeda motor. Pembiayaan konsumen yang diberikan adalah dalam bentuk kepemilikan sepeda motor dengan fasilitas pembiayaan yang meliputi jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Per 31 Desember 2020, rata-rata tenor kredit pelanggan Perseroan adalah 20 (dua puluh) bulan. Selain fasilitas pembiayaan untuk sepeda motor baru, Perseroan juga memberikan fasilitas pembiayaan untuk sepeda motor bekas. Dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada konsumen, selain menggunakan dana sendiri, Perseroan juga menjalin kerja sama dengan beberapa bank nasional dan lembaga pembiayaan dalam memberikan fasilitas pembiayaan bersama (*joint-financing*), dimana pihak bank dan lembaga pembiayaan memberikan fasilitas pembiayaan sebagian dari nilai kredit, sisanya dibiayai oleh Perseroan.

b. Pemasaran

Kegiatan Pemasaran memegang peranan penting dalam rangka memperluas kegiatan usaha maupun meningkatkan pangsa pasar. Wilayah pemasaran Perseroan meliputi wilayah Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. Salah satu ttrategi pemasaran Perseroan yaitu dengan penambahan kantor cabang serta melihat potensi pasar yang ada berhasil meningkatkan pangsa pasar di sektor penjualan sepeda motor. Dalam upaya Perseroan untuk menumbuhkan pembiayaan sepeda motor, Perseroan menawarkan berbagai skema pembiayaan konvensional dan/atau skema pembiayaan syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat setempat. Penyediaan berbagai skema pembayaran dan program yang inovatif ini merupakan kristalisasi dari masukan yang diperoleh dari divisi pemasaran Perseroan dan juga dari pelanggan potensial Perseroan. Semua skema pembiayaan ini dapat diterapkan di seluruh cabang namun disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang ada.

c. Jaringan Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan sangat ditunjang oleh luasnya jaringan pelayanan dan pemasaran produk-produk Perseroan. Saat ini Perseroan memiliki jaringan operasional melalui 270 kantor cabang dan 4 jaringan kantor pelayanan. Jumlah jaringan Perseroan yang demikian banyak dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia merupakan salah satu keunggulan kompetitif Perseroan. Dengan jaringan pelayanan yang begitu luas, Perseroan mampu melayani pelanggan dari berbagai golongan profesi dan pendapatan, yang secara langsung juga mengurangi risiko pembiayaan melalui diversifikasi kredit.

d. Operasional

Pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor hanya akan diberikan Perseroan kepada calon konsumen yang mengambil unit sepeda motor pada *dealer-dealer* yang telah menandatangani *Memorandum of Understanding* dengan Perseroan. Hal ini dipersyaratkan karena harus ada kepastian bahwa BPKB dapat diserahkan oleh *dealer* yang bersangkutan. Aktivitas pemasaran, penerimaan aplikasi, penilaian calon konsumen, persetujuan kredit, penerimaan pembayaran, pemeliharaan piutang sampai dengan penyelesaian kredit bermasalah (*remedial*) dan penjualan kembali jaminan yang diambil alih dilakukan oleh Kantor Pelayanan, sedangkan pembayaran ke *dealer* juga dilakukan oleh Kantor Pelayanan berdasarkan *dropping* dana dari Kantor Pusat.

8. Persaingan Usaha

Tingginya persaingan usaha di dalam industri pembiayan ini mengharuskan setiap perusahaan pembiayaan memberikan pelayanan yang terbaik kepada para konsumennya diantaranya kemudahan dalam mendapatkan kredit, kemudahan melakukan pembayaran cicilan, kecepatan dalam survei dan lain sebagainya.

Perseroan dalam melakukan kegiatan usaha pembiayaan konsumen menjalankan berbagai strategi usaha. Hal ini disebabkan oleh ketatnya persaingan usaha serta untuk menjaga kelangsungan dan perkembangan usaha Perseroan, sehingga strategi usaha yang dimiliki Perseroan merupakan acuan yang diambil untuk perkembangan Perseroan di masa yang akan datang.

9. Prospek Usaha

Industri sepeda motor Indonesia masih sangat menarik untuk dijalani. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), mulai tahun 2016, populasi sepeda motor di Indonesia melebihi 100 juta unit, sebuah angka fantastik yang saat itu memberikan kontribusi terbesar yaitu lebih dari 80% dari total jumlah kendaraan yang terdaftar di Indonesia. Pada penutupan tahun 2018, populasi sepeda motor di Indonesia mencapai lebih dari 120 juta unit atau melebihi setengah dari populasi penduduk Indonesia. Perkembangan ini terus melaju dengan cepat, Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menuturkan, sepanjang tahun 2019 sendiri, penjualan sepeda motor di Indonesia mencapai hampir 6,5 juta unit. Hal ini membuat populasi sepeda motor di Indonesia mencapai sekitar 130 juta unit pada akhir tahun lalu. Dengan besarnya jumlah penduduk dan tidak memadainya fasilitas transportasi publik telah menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki peran yang signifikan dalam penjualan dan produksi sepeda motor di pasar internasional. Indonesia saat ini menjadi negara terbesar ketiga dari sisi penjualan sepeda motor, setelah China dan India. Di kawasan Asean, Indonesia menempati peringkat pertama.

Pasar pembiayaan sepeda motor bekas cukup menjanjikan dan menjadi incaran perusahaan pembiayaan. Pasar pembiayaan sepeda motor bekas menawarkan marjin yang lebih tinggi bagi industri pembiayaan. Selain itu, belum banyak perusahaan pembiayaan yang bermain di ceruk pasar ini.

Perkembangan Industri Sepeda Motor di Indonesia

Berdasarkan data dari AISI, penjualan sepeda motor domestik di tanah air mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun dimulai sejak tahun 2000 hingga tahun 2019 dimana rata-rata pertumbuhan sebesar 11,19% per tahun sejak tahun 2000 - 2019. Namun sejak awal 2015 penjualan sepeda motor mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga akhir tahun 2017 sebesar 9,22%. Seiring membaiknya perekonomian dunia serta investasi pemerintah di infrastuktur, hasil penjualan sepeda motor domestik pada tahun 2019 meningkat sebesar 1,63% dan diharapkan industri sepeda motor akan terus membaik untuk tahun 2020 kedepan.

Perkembangan Industri Pembiayaan

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) mencatat bahwa industri pembiayaan sepanjang tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan, yakni turunnya piutang pembiayaan lebih dari 17% dibandingkan tahun 2019. Hal ini terjadi akibat dari tergerusnya penjualan mobil dan motor sekitar 50% sepanjang tahun 2020. Namun profil risiko perusahaan pembiayaan masih dapat terkendali pada tahun 2020, yakni dengan NPF sebesar 4,5%. Pada tahun 2021, seiring dengan optimisme vaksinasi dan pemulihan ekonomi dengan meningkatnya konsumsi masyarakat yang kembali pulih, maka diharapkan tahun 2021 industri pembiayaan dapat tumbuh positif sekitar 5%. Jika ditinjau dengan jangka waktu yang lama kedepannya, industri pembiayaan akan bertumbuh pesat seperti yang telah dibuktikan pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, pembiayaan multiguna yang umumnya merupakan pembiayaan kredit sepeda motor masih merupakan tulang punggung bagi industri pembiayaan. Perusahaan pembiayaan tidak hanya fokus kepada pembiayaan penjualan sepeda motor baru, namun juga melayani pembiayaan sepeda motor bekas. Hal ini menyebabkan bisnis perusahaan pembiayaan tidak tergantung pada pasang surutnya penjualan sepeda motor baru, melainkan lebih pada pasar motor bekas yang akan terus meningkat dengan pulih dan bertumbuhnya perekonomian dan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia di tahun-tahun mendatang.

Di Indonesia saat ini terdapat ratusan perusahaan yang menjalankan usaha pembiayaan kepemilikan sepeda motor, baik yang khusus melakukan pembiayaan sepeda motor maupun yang merupakan bagian dari usaha multi-financing. Namun dalam skala usaha tidak banyak perusahaan pembiayaan sepeda motor yang memiliki jaringan nasional.

Sebagai bagian dari industri pembiayaan konsumen, pembiayaan sepeda motor memiliki prospek yang baik karena beberapa hal-hal berikut:

- Fasilitas kendaraan umum yang belum memadai menyebabkan sebagian besar masyarakat merasa perlu memiki kendaraan pribadi dengan harga terjangkau.
- Meningkatnya pendapatan masyarakat kelas bawah dan menengah yang mulai menggeser pola transportasi sehari-hari dari alat transportasi tradisional ke sepeda motor.
- Diminatinya sepeda motor sebagai sarana mata pencaharian. antara lain untuk berjualan.
- Menaiknya biaya transportasi umum memicu penggunaan sarana transportasi roda dua.

Dengan faktor-faktor pendorong tersebut, potensi pertumbuhan industri pembiayaan akan terbuka lebar.

Keterangan secara lengkap mengenai Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus.

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI SUKUK MUDHARABAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN SUKUK MUDHARABAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

Keterangan secara lengkap mengenai Perpajakan dapat dilihat pada Bab IX dalam Prospektus.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Akuntan Publik : KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers)
Konsultan Hukum : HKGM & Partners
Notaris : Fathiah Helmi, S.H.
Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Agen Pembayaran : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

Keterangan secara lengkap mengenai Lembaga Dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XI dalam Prospektus.

TATA CARA PEMESANAN SUKUK MUDHARABAH

Informasi mengenai Tata Cara Pemesanan Sukuk Mudharabah dapat dilihat dalam Prospektus Bab XIII tentang Tata Cara Pemesanan Sukuk Mudharabah.

AGEN PEMBAYARAN

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telepon : (021) 5299 1099
Faksimili : (021) 5299 1199
Website : www.ksei.co.id
Email : helpdesk@ksei.co.id

PENYEBARAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH

Pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 25 dan 28 Juni 2021, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah dapat diperoleh pada kantor atau *email* Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH

PT Sucor Sekuritas
Sahid Sudirman Center Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220
Tel. (021) 8067 3000, Fax. (021) 2788 9288
Website: www.sucorsekuritas.com
Email: ib@sucorsekuritas.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS

hanind